

PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DENGAN PERKARA PIDANA

Oleh
Suwondo, S.H.

I. PENDAHULUAN

Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada tanggal 31 Desember 1981 maka dicabutlah berlakunya HIR stb. tahun 1941 nomor 44 sepanjang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan untuk mencabut HIR stb. tahun 1941 nomor 44 sepanjang mengenai hukum acara pidana, antara lain ialah karena banyak ketentuan-ketentuan di dalamnya yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.

Memang terdapat perbedaan yang fundamental antara KUHAP dengan HIR stb. tahun 1941 nomor 44, terutama mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat, negara, hak azasi manusia dan pembatasan kewenangan alat perlengkapan negara penegak hukum. Hal-hal baru atau hal-hal yang pengaturannya lebih rinci yang dimuat dalam KUHAP antara lain sebagai berikut:

1. Hak-hak tersangka atau terdakwa
2. Bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perkara

3. Syarat-syarat penangkapan, penahanan, beserta jangka waktunya
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi
5. Penggabungan perkara gugatan
6. Praperadilan
7. Acara pemeriksaan perkara pidana
8. Upaya hukum
9. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan, dan lain-lain.

Dari hal-hal baru tersebut di atas, hanya satu hal yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu perihal; Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, yang dalam KUHAP dimuat dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, cukup menarik untuk ditelaah bukan saja ini merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana, tetapi juga lebih-lebih karena masalah gugatan pada prinsipnya menjadi wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian gugatan ganti kerugian untuk kasus-kasus tertentu pihak yang dirugikan/penggugat dapat menempuh dengan

memilih satu dari dua cara yaitu:

- a) Menggugat lewat peradilan Perdata atau
- b) Mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana kepada hakim ketua sidang yang akan/sedang memeriksa perkara pidana.

Tidak setiap gugatan ganti kerugian selalu dapat dimintakan untuk digabungkan pemeriksaannya dengan perkara pidana.

II. PERMASALAHAN

Dengan dimungkinkannya oleh ketentuan KUHAP untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, maka yang menjadi masalah ialah; Hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan/dipertimbangkan sebelum seseorang menentukan pilihannya untuk mengajukan permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana?

III. PEMBAHASAN

Ditinjau dari siapa yang berhak mengajukan tuntutan atau gugatan ganti kerugian, di dalam KUHAP dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

- A. Tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh:
 - tersangka
 - terdakwa
 - terpidana
 karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan

yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- B. Gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh orang yang menderita kerugian karena perbuatan pidana yang didakwakan dilakukan oleh orang lain.

- Ad. A. Tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh terdakwa atau terpidana.

Tuntutan ganti kerugian jenis ini pertama sekali dimuat dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang no. 14 tahun 1970 yang menyatakan: Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Penjabaran lebih lanjut dari isi pasal 9 ayat (1) Undang-undang no. 14 tahun 1970 dimuat dalam pasal 95 sampai dengan pasal 97 KUHAP. Pasal 95 dan pasal 96 KUHAP memuat tentang kerugian yang isinya antara lain: Tuntutan ganti kerugian yang disebabkan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dapat dilakukan oleh tersangka terdakwa atau terpidana.

Tuntutan ganti kerugian jenis ini mungkin dilakukan lewat Praperadilan, mungkin pula diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri.

Jika tuntutan ganti kerugian itu dilakukan oleh tersangka atau ahli warisnya dan atas perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, maka yang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian tersebut ialah sidang Prapengadilan.

Hal tersebut di atas hanya sebagian saja dari kewenangan Praperadilan. Sebab disamping itu Praperadilan masih mempunyai kewenangan lain, yaitu untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Jika perkara atas diri tersangka, terdakwa atau ter-

pidana diajukan ke pengadilan, maka pemeriksaan tuntutan ganti kerugian tersebut dilakukan oleh pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Untuk itu, pemeriksaan terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut mengikuti acara praperadilan. Praperadilan merupakan lembaga baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam HIR maupun dalam perundang-undangan lainnya. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan penangkapan ataupun penahanan yang tidak sah. Tersangka berhak menuntut ganti kerugian jika praperadilan memutuskan bahwa penangkapan dan atau penahanan atas diri tersangka adalah tidak sah. Pasal 83 (1) KUHAP antara lain menyatakan bahwa putusan Praperadilan yang menyangkut tentang sah tidaknya penangkapan dan atau sah tidaknya penahanan tidak dapat dimintakan banding. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.

Perlu kiranya disadari bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam permintaan praperadilan itu adalah

masalah permintaan keadilan, dan kekeliruan dalam memutuskan keadilan yang tidak dapat dimintakan koreksi kepada badan peradilan tertinggi kita, dapat menyebabkan orang menjadi frustrasi dan tidak mempunyai kepercayaan lagi tentang masih adanya keadilan di tanah air.¹⁾

Meskipun pasal 95 KUHAP memberi kemungkinan bagi terdakwa untuk menuntut ganti kerugian, namun perlu diketahui bahwa tidak setiap putusan hakim yang berupa putusan bebas dari dakwaan ataupun lepas dari segala tuntutan hukum selalu dapat memperoleh ganti kerugian. Sebab hakimlah yang akhirnya menentukan berdasarkan keadilan. Sebab mungkin terjadi bahwa orang yang benar-benar bersalah diputus bebas hanya karena secara teknis yuridis kesalahannya kurang dapat dibuktikan. Hakim mungkin akan menolak tuntutan ganti kerugian dari tersangka atau terdakwa yang ditangkap, ditahan dituntut atau diadili karena dengan membuat pengakuan-pengakuan palsu, dengan maksud menyesatkan pejabat penyidik penuntut umum maupun hakim. Jika terdakwa ini kemudian diputus bebas, maka mung-

kin sekali tuntutan ganti kerugiannya tidak dikabulkan hakim.

Tuntutan ganti kerugian sebagai tersebut pasal 77b KUHAP ataupun pasal 95 KUHAP besarnya bukan tanpa batas. Ini berbeda dengan gugatan ganti kerugian dalam perkara perdata yang tidak dibatasi jumlahnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 (tentang Pelaksanaan KUHAP) antara lain dinyatakan bahwa jumlah ganti kerugian paling sedikit lima ribu rupiah dan paling banyak satu juta rupiah. Sedangkan jika penangkapan penahanan atau tindakan lain tersebut mengakibatkan sakit, atau cacat sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya atau mati, jumlah ganti kerugian paling banyak tiga juta rupiah.

Adanya ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum acara pidana adalah suatu konsekuensi logis guna terwujudnya dan terselenggarakannya hak asasi manusia, dan dengan demikianpun guna terwujudnya dan terselenggarakannya hak asasi manusia ini "diatur pula dalam bab ke XIII tentang penggabungan gugatan ganti kerugian".²⁾

Oemar Seno Adji mengata-

kan, bahwa pada umumnya dapat disetujui bahwa ganti kerugian tidak diberikan kepada terdakwa apabila ia dengan sengaja menyesatkan ("misleads") para pejabat hukum atau ia dengan sengaja menyebabkan penegak hukum untuk mengira (dan percaya) bahwa mereka mempunyai cukup alasan yang sah untuk mempunyai "suspicion". Maka para pejabat dilepaskan dari tanggung jawabnya, apabila ia melakukan tindakan hukum "in good faith", dengan itikad baik, bahwa mereka mempunyai alasan yang wajar ("reasonable" dan "probable") dalam melakukan penangkapan dan penahanan.³⁾

Ad. B. Gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh orang yang menderita kerugian karena perbuatan pidana yang didakwakan oleh orang lain.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang mungkin saja menimbulkan kerugian pada orang lain. Yang dirugikan karena perbuatan pidana tersebut mungkin seorang atau lebih dari seorang.

Pihak yang dirugikan ini dapat menggugat pelaku perbuatan pidana tersebut melalui peradilan Perdata. Namun sebagaimana dike-

tahui, dalam KUHAP di-muat aturan yang memungkinkan pihak yang dirugikan karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, untuk menggugat pelaku perbuatan pidana tersebut melalui peradilan pidana. Ketentuan tentang ini dikenal dengan "Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana".

Ketentuan dalam KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana antara lain berupa:

- a. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya mungkin dilakukan jika ada permintaan dari orang yang dirugikan karena perbuatan yang didakwakan pada seseorang dalam pemeriksaan perkara pidana. Dengan demikian inisiatif penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana ada pada orang yang dirugikan, termasuk pula korban dari suatu perbuatan pidana. Permintaan ditujukan pada hakim ketua sidang.
- b. Jangka waktu permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dan perkara pidana paling lambat sebelum

penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jika penuntut umum tidak hadir, permintaan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.

- c. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, jika putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Dari ketentuan ini jelas bahwa nasib putusan mengenai ganti kerugian ini sepenuhnya mengikuti putusan pidananya.
- d. Penggabungan antara perkara tuntutan ganti kerugian dengan perkara pidana, dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Ini berarti bahwa jika atas putusan perkara pidananya dimintakan banding, maka putusan atas perkara gugatan ganti kerugian juga harus ikut banding.
- e. Sebaliknya jika putusan atas perkara pidananya tidak dimintakan banding, maka putusan atas perkara ganti kerugian juga tidak dapat dimin-takan banding.
- f. Dalam pemeriksaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana,

maka berlaku dua hukum acara. Dalam hal memeriksa perkara pidana, maka digunakan hukum acara pidana. Sebaliknya dalam pemeriksaan perkara gugatan ganti kerugian, digunakan hukum acara perdata, sepanjang dalam KUHAP tidak ditentukan lain.

Yang diperhatikan oleh KUHAP bukan saja tersangka, terdakwa atau terpidana, tetapi juga hak dari orang yang menderita kerugian materiel yang disebabkan karena dilakukannya suatu perbuatan pidana. Perlindungan terhadap hak dari korban suatu tindak pidana ini diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapat ganti rugi yang diteritanya, ialah dengan menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan untuk mendapat ganti rugi, yang pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata dan yang biasanya diajukan melalui gugatan perdata dengan demikian akan menghemat waktu dan biaya perkara.⁴⁾ Maksud KUHAP memberi kemungkinan penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana agar menghemat biaya dan waktu memang kadang-kadang ada benarnya.

Salah satu segi negatif sistem peradilan perdata adalah antara lain dalam hal penyelesaian ganti kerugian. Oleh karena dapat memakan waktu lama dan tinggi ongkosnya (biaya pengacara). Sehingga kerap kali menimbulkan kesulitan bagi

mereka yang tidak mampu material, finansial.⁵⁾

Bagi mereka yang dirugikan atau menjadi korban dari suatu perbuatan pidana sebelum menentukan sikapnya untuk mengajukan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya ada baiknya mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, mengakibatkan penggugat tidak diperkenankan maju sendiri ke pengadilan sebagai penggugat yang beracara di sidang pengadilan sebagaimana perkara perdata pada umumnya. Demikian juga penggugat tidak dapat memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili di muka sidang pengadilan perdata. Nasib gugatannya sepenuhnya di tangan hakim yang memeriksa perkara pidananya.

Dari segi ini mungkin benar bahwa biaya perkara bagi penggugat menjadi lebih ringan jika dibanding pemeriksaan oleh sidang pengadilan perdata. Hakim dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana berperan "ganda". Yaitu sebagai hakim yang memeriksa perkara yang sedang dihadapi sekaligus mewakili atau sebagai "kuasa" dari yang dirugikan atau korban dari perbuatan pidana yang sedang diperiksa. Ini suatu tugas yang berat.

Dalam beracara di muka si-

dang pengadilan perdata, penggugat --jika ia merasa mampu-- dapat maju sendiri ke sidang pengadilan. Sebaliknya ia juga berhak penuh untuk memberi kuasa kepada penasihat hukum/pengacara untuk beracara di sidang pengadilan dalam rangka memperjuangkan gugatannya. Hal ini tidak dimungkinkan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.

2. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Dengan adanya ketentuan ini berarti bahwa jika putusan pengadilan mengenai perkara pidananya mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena baik terdakwa maupun penuntut umum tidak mengajukan banding maka akan berakibat bahwa putusan pengadilan mengenai gugatan ganti kerugiannya juga memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Yang berhak minta banding dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana ini hanya terdakwa dan penuntut umum saja. Hakim yang mewakili atau selaku "kuasa" dari pihak yang dirugikan tidak mempunyai hak untuk minta banding. Ini suatu hal yang sangat berbeda dengan hak penggugat dalam beracara di sidang pengadilan perdata. Tiadanya hak untuk banding ba-

gi yang dirugikan dalam penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh yang dirugikan karena perbuatan pidana sebelum menentukan pilihannya untuk mengajukan permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.

Dalam bab XIII KUHAP yaitu tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, tidak disinggung tentang kemungkinan menggunakan upaya hukum lainnya; kasasi, kasasi demi kepentingan hukum maupun peninjauan kembali. Menurut hemat kami hak-hak tersebut masih ada dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini. Masalahnya ialah adakah hak bagi penggugat yang di "wakili" hakim untuk mengajukan kasasi, sebagaimana hak penggugat dalam perkara perdata di muka sidang pengadilan perdata? Menurut hemat kami hak yang demikian inipun tidak ada pada hakim tersebut, seperti halnya dalam hal banding. Dari sini jelas bahwa hak penggugat untuk menggunakan upaya hukum kasasi menjadi tertutup dalam penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana. Suatu hal yang perlu dipertimbangkan oleh yang meminta penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana.

3. Dalam pasal 100 KUHAP antara lain dinyatakan:

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak dimintakan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Dari ketentuan dalam pasal 100 KUHAP ada hal-hal yang mungkin dapat merugikan pihak yang minta penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.

Jika putusan hakim --terutama-- tentang ganti kerugian telah dipandang adil oleh penggugat, maka dengan sendirinya ia ingin secepatnya putusan tersebut dilaksanakan. Keinginan tersebut akan tertunda, bahkan mungkin akan menjadi sirna jika terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding.

Kepastian akan adanya ganti kerugian sepenuhnya bergantung pada isi putusan pengadilan tingkat banding. Jika putusan pengadilan banding yang berupa ganti kerugian lebih kecil dari putusan pengadilan tingkat pertama, maka ini suatu kerugian bagi pihak korban. Demikian juga sebaliknya.

Jika putusan pengadilan tentang gugatan ganti kerugian oleh penggugat dipandang tidak adil, sedangkan terdakwa atau penuntut umum tidak mengajukan banding, maka ketidakadilan tersebut tidak mungkin diperbaiki lagi. Dalam peradilan perdata ketidakadilan tersebut masih dimungkinkan untuk dimin-takan banding maupun kasasi.

4. Dalam pemeriksaan perkara pidana, putusan hakim dapat berupa:
 - a. dibebaskan dari segala dakwaan,
 - b. dilepas dari tuntutan hukum,
 - c. dipidana.

Mengingat ketiga macam putusan tersebut, yang menjadi masalah ialah: terhadap jenis putusan yang manakah hakim dapat juga menjatuhkan putusan tentang ganti kerugian, seperti yang dimintakan oleh pihak yang merasa dirugikan karena perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa? Dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP, tidak ada ketentuannya tentang hal tersebut. Demikian juga dalam penjelasan pasal-pasalanya.

Menurut hemat kami, hakim selalu dapat menjatuhkan putusan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, tanpa mengingat putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa. Jelasnya ialah apakah putusan hakim terhadap terdakwa berupa putusan dibe-

baskan, dilepas ataupun dipidana, kepada terdakwa selalu mungkin dijatuhi putusan berupa membayar ganti kerugian kepada yang dirugikan. Ini semua tanpa meninggalkan rasa keadilan dari hakim.

Dasar pemikiran kami ialah bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata oleh pengadilan perdata, dalam hal penjatuhan putusan membayar ganti kerugian tidak ada keharusan mengingat/memperhatikan putusan hakim dalam perkara pidananya. Sebab tidak setiap perkara perdata selalu berkaitan dengan perkara pidana dan sebaliknya. Dalam pada itu apabila perkara pidananya diputus dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka dalam diktum putusan dinyatakan bahwa gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima.⁶⁾

Menurut hemat kami apapun putusan dalam perkara pidana-nya tidak selalu menyebabkan gugatan ganti kerugian tersebut tidak dapat diterima. Yang dapat dimintakan ganti kerugian dalam gabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan yang lain daripada itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan dapat diajukan sebagai perkara perdata biasa. Gugatan baru tersebut tidak merupakan perkara

ne bi in idem.⁷⁾

5. Dalam penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana di dalam KUHAP tidak ada ketentuannya tentang nasib dari perkara gugatan ganti kerugiannya, jika terdakwa dan atau jaksa kasasi. Dalam KUHAP juga tidak diatur bagaimana nasib gugatan ganti kerugiannya yang digabungkan dengan perkara pidana, jika Jaksa Agung mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum. Begitu juga bagaimana nasib gugatan ganti kerugiannya yang digabungkan dengan perkara pidananya manakala terdakwa mengajukan permohonan peninjauan kembali. Akankah gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidananya juga terbawa oleh perkara pidananya ke pemeriksaan tingkat kasasi, kasasi demi kepentingan hukum atau pun ke peninjauan kembali?

Jika mengingat ketentuan pasal 100 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding, maka memang ada alasan untuk berfikir ke arah isi pasal 100 ayat (1) KUHAP ini. Artinya perkara gugatan ganti kerugiannya dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, kasasi demi kepentingan hukum maupun dalam peninjauan kem-

bali. Jika demikian halnya, maka penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya tidak lagi menghemat waktu, tidak lagi berlangsung cepat, sehingga sulit untuk memastikan pilihan bagi pihak yang dirugikan. Banyak perkara pidana maupun perkara perdata yang harus menunggu cukup lama dalam pemeriksaan tingkat banding maupun tingkat kasasi.

Berbeda dengan di Indonesia, di Belanda masalah penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya ini diadakan pembatasan mengenai jumlah ganti kerugiannya. Proses "voeding" inilah yang dimulai dalam NSv. pasal 332, dengan menyatakan bahwa pihak yang dirugikan (de beledeige partij) dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, dan mengadakan voeding dalam jalannya perkara pidana, yang oleh pengadilan diperkenankan untuk diajukan pada suatu saat, sebelum diajukan rekwisitoir, dan ganti rugi dibatasi pada jumlah tertentu.⁸⁾

IV. KESIMPULAN

- 1) Tujuan utama dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana agar dicapai peradilan yang cepat dan biaya ringan tidak selalu dapat diwujudkan.
- 2) Yang dapat dimintakan ganti kerugian dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian

dengan perkara pidana, hanya terbatas pada kerugian materiel saja.

- 3) Dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, hak-hak dari pihak yang dirugikan banyak

dikurangi.

- 4) Ganti kerugian yang belum dimintakan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, dapat dimintakan dalam ujud gugatan melalui peradilan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, 1990, hal. 152.
- 2) Ignatius Ridwan Widyadarma, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Tanjung Mas Semarang, 1983, hal. 90.
- 3) H. Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981, Hal. 74.
- 4) Departemen Kehakiman RI., *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, 1982, hal. 139.
- 5) Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*, Akademi Pressindo, 1983, hal. 120.
- 6) Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, 1990, Hal. 53.
- 7) Departemen Kehakiman RI., *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, 1982, hal. 141.
- 8) H. Oemar Seni Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981, hal. 75.